

PELATIHAN PPh BADAN SEBAGAI BEKAL WIRAUSAHA UNTUK GENERASI MUDA**Agustin Ekadjaja^{1*}, Orly Putri Guseva², Samantha Sandjaja³, Angela Gracia⁴**^{1,2,3,4}Universitas TarumanagaraEmail: agustine@fe.untar.ac.id¹**Abstrak**

Pengenalan perpajakan sejak usia sekolah merupakan salah satu upaya untuk membangun literasi keuangan dan kesadaran sebagai warga negara yang baik. Pemahaman mengenai pajak tidak hanya penting bagi masyarakat yang telah bekerja, tetapi juga dapat menjadi bekal bagi generasi muda yang memiliki minat untuk berwirausaha. Salah satu aspek perpajakan yang perlu diperkenalkan secara sederhana adalah Pajak Penghasilan (PPh) Badan, yaitu pajak yang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh suatu badan usaha. Oleh karena itu, kegiatan pelatihan dengan topik "Pelatihan PPh Badan sebagai Bekal Wirausaha untuk Generasi Muda" dilaksanakan bagi generasi muda sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi perpajakan dan kewirausahaan sejak dini. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman dasar kepada siswa mengenai konsep pajak, fungsi pajak bagi negara, pengertian PPh Badan, serta keterkaitannya dengan kegiatan usaha. Selain itu, pelatihan bertujuan menumbuhkan kesadaran bahwa kewajiban perpajakan merupakan bagian penting dari pengelolaan usaha yang bertanggung jawab dan dapat dikenalkan sejak usia sekolah. Metode pelatihan dilaksanakan secara interaktif melalui penyampaian materi menggunakan bahasa sederhana, presentasi visual, diskusi, tanya jawab, permainan edukatif, serta studi kasus sederhana mengenai kegiatan usaha. Pendekatan tersebut digunakan agar siswa dapat memahami konsep PPh Badan secara kontekstual dan tidak hanya bersifat teoritis. Luaran kegiatan berupa peningkatan pengetahuan dan pemahaman siswa mengenai dasar-dasar PPh Badan, fungsi pajak, serta hubungan antara perpajakan dan kewirausahaan. Selain itu, kegiatan diharapkan dapat meningkatkan minat siswa terhadap dunia usaha, membentuk sikap positif terhadap kepatuhan pajak, dan memberikan bekal awal untuk menjadi generasi muda yang memiliki literasi keuangan dan perpajakan. Dengan demikian, pengenalan PPh Badan melalui metode pembelajaran yang menyenangkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun generasi wirausaha yang sadar pajak, bertanggung jawab, dan berintegritas.

Kata kunci: PPh Badan; Literasi Perpajakan; Kewirausahaan; Generasi Muda; Siswa.

Abstract

The introduction of taxation from school age is one of the efforts to build financial literacy and awareness as a good citizen. Understanding taxes is not only important for people who have worked, but can also be a provision for the younger generation who have an interest in entrepreneurship. One aspect of taxation that needs to be introduced simply is Corporate Income Tax (PPh), which is a tax related to the income earned by a business entity. Therefore, training activities with the topic "Corporate Income Tax Training as Entrepreneurial Provision for the Young Generation" are

carried out for the younger generation as part of efforts to improve tax literacy and entrepreneurship from an early age. The purpose of this activity is to provide students with a basic understanding of tax concepts, tax functions for the state, the meaning of Corporate Income Tax, and its relationship with business activities. In addition, the training aims to foster awareness that tax obligations are an important part of responsible business management and can be introduced from school age. The training method is carried out interactively through the delivery of material using simple language, visual presentations, discussions, questions and answers, educational games, and simple case studies of business activities. This approach is used so that students can understand the concept of Corporate Income Tax contextually and not only theoretical. The output of the activity is in the form of increasing students' knowledge and understanding of the basics of Corporate Income Tax, tax functions, and the relationship between taxation and entrepreneurship. In addition, the activity is expected to increase students' interest in the business world, form a positive attitude towards tax compliance, and provide initial provisions to become the younger generation who have financial and tax literacy. Thus, the introduction of Corporate Income Tax through fun learning methods can be the first step in building a generation of entrepreneurs who are tax aware, responsible, and with integrity.

Keywords: *Corporate Income Tax; Tax Literacy; Entrepreneurship; Young Generation; Students.*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan kehidupan bernegara. Pajak tidak hanya berkaitan dengan kewajiban administratif masyarakat yang telah bekerja, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas ekonomi, dunia usaha, dan pembangunan nasional. Pemahaman mengenai perpajakan perlu dibangun secara bertahap sejak usia sekolah agar generasi muda memiliki pengetahuan dan sikap yang memadai ketika pada masa mendatang memasuki dunia kerja maupun menjalankan kegiatan usaha. Pendidikan perpajakan sejak dini juga sejalan dengan arah kebijakan inklusi kesadaran pajak yang mendorong integrasi pengetahuan perpajakan ke dalam lingkungan pendidikan (Direktorat Jenderal Pajak [DJP], 2023).

Urgensi pendidikan perpajakan semakin kuat apabila dikaitkan dengan perkembangan minat kewirausahaan generasi muda. Generasi muda tidak hanya dipersiapkan sebagai pencari kerja, tetapi juga perlu diarahkan untuk memiliki kemampuan menciptakan peluang ekonomi melalui kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan pada peserta didik dapat membantu membangun pola pikir kreatif, inovatif, mandiri, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pemecahan masalah. Supardi et al. (2022) menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan berkaitan dengan pembentukan kompetensi kewirausahaan peserta didik. Pengenalan kewirausahaan pada usia sekolah dapat menjadi bagian penting dalam menyiapkan generasi yang memiliki kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja dan lingkungan ekonomi.

Pengenalan pajak pada generasi mudasangat penting dan dapat dimulai dengan konsep ekonomi, kegiatan produksi dan konsumsi, pengelolaan uang, serta berbagai bentuk aktivitas ekonomi di lingkungan sekitar. Pendidikan kewirausahaan pada tingkat sekolah menengah pertama bukan semata-mata bertujuan agar siswa segera menjadi pelaku usaha, tetapi terutama untuk

membentuk pola pikir kewirausahaan sejak dini. Penelitian mengenai generasi mudamenunjukkan bahwa literasi keuangan mempunyai hubungan dengan perilaku kewirausahaan. Español et al. (2024) menemukan adanya keterkaitan antara literasi keuangan dan *entrepreneurial behavior* pada siswa *junior high school*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan keuangan dapat menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun kesiapan kewirausahaan sejak usia sekolah.

Pengenalan pajak sejak dini penting karena literasi perpajakan tidak terbentuk secara instan. Tantriangela dan Setyowati (2023) menjelaskan bahwa literasi pajak mencakup pengetahuan dan pemahaman yang dapat mendukung individu dalam menjalankan hak serta kewajiban perpajakannya. Literasi pajak juga perlu dipandang lebih luas daripada sekadar mengetahui tarif pajak. Pemahaman mengenai tujuan pajak, mekanisme dasar, kewajiban wajib pajak, serta manfaat pajak merupakan bagian dari pembentukan *tax literacy*. Hubungan antara literasi pajak dan kepatuhan juga memiliki relevansi dengan pendidikan calon wirausaha. Penelitian mengenai UMKM menunjukkan bahwa literasi pajak mempunyai hubungan dengan perilaku perpajakan, sementara faktor kepercayaan terhadap otoritas pajak dapat menjadi mekanisme penting yang menghubungkan literasi dengan kepatuhan (Rika et al., 2026). Pembentukan pemahaman perpajakan sejak dini tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membangun persepsi positif terhadap pajak dan tanggung jawab ekonomi. Pengenalan PPh Badan juga dapat menjadi jembatan antara pendidikan kewirausahaan dan literasi keuangan. Seorang calon wirausaha tidak cukup hanya mampu menghasilkan produk dan melakukan pemasaran, tetapi juga perlu memahami pencatatan keuangan, biaya, pendapatan, laba, dan kewajiban usaha. Penelitian Wicaksono et al. (2024) menunjukkan bahwa literasi keuangan merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan intensi kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan yang dilengkapi literasi keuangan dan perpajakan akan memberikan perspektif yang lebih utuh kepada peserta didik.

Kebijakan inklusi pajak juga semakin menempatkan sekolah sebagai bagian dari ekosistem pendidikan kesadaran pajak. Tussifah dan Hapsari (2025) menekankan pentingnya penguatan peran guru dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan pajak, termasuk melalui pelatihan, penggunaan aplikasi untuk simulasi pelaporan, serta forum diskusi antara guru dan siswa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan pajak membutuhkan dukungan lingkungan pembelajaran yang sistematis, bukan hanya kegiatan sosialisasi yang bersifat satu kali. Dari perspektif pendidikan kewirausahaan, literasi keuangan juga menjadi komponen yang tidak dapat dipisahkan. Najjuah et al. (2024) menemukan bahwa literasi keuangan dan pendidikan kewirausahaan berpengaruh positif terhadap intensi kewirausahaan digital siswa. Pendidikan kewirausahaan juga berperan sebagai mediator hubungan antara literasi keuangan dan intensi kewirausahaan digital. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa kemampuan memahami aspek keuangan dapat memperkuat kesiapan generasi muda dalam memanfaatkan peluang kewirausahaan.

Koraag et al. (2025) juga menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan dan lingkungan kewirausahaan berkontribusi terhadap pengembangan entrepreneurial mindset dan literasi keuangan yang selanjutnya berkaitan dengan intensi serta kesiapan berwirausaha. Walaupun penelitian tersebut dilakukan pada mahasiswa, implikasinya dapat digunakan sebagai dasar bahwa kompetensi kewirausahaan perlu dibangun melalui proses pendidikan yang bertahap. Pada tingkat SMP, tahapannya dapat dimulai dari pengenalan konsep sederhana seperti ide usaha, modal, pendapatan, biaya, laba, tanggung jawab, dan pajak. Berdasarkan analisis situasi mitra menyadari kebutuhan untuk memperluas cakupan literasi siswa dari sekadar pengetahuan kewirausahaan menuju pemahaman mengenai tanggung jawab ekonomi sebagai calon pelaku usaha. PPh Badan dapat digunakan sebagai pintu masuk untuk mengenalkan hubungan antara aktivitas usaha dan kewajiban kepada negara.

2. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah masih terbatasnya pemahaman mengenai konsep dasar perpajakan, khususnya hubungan antara kegiatan usaha dengan PPh Badan. Bagi siswa, istilah seperti wajib pajak badan, penghasilan kena pajak, biaya usaha, laba, dan kewajiban pelaporan dapat terdengar abstrak apabila disampaikan melalui pendekatan teoritis semata. Kegiatan “Pelatihan PPh Badan sebagai Bekal Wirausaha untuk Generasi Muda” diarahkan untuk mengisi kebutuhan tersebut melalui materi yang sederhana, kontekstual, dan sesuai dengan karakteristik siswa. PPh Badan diperkenalkan bukan sebagai materi teknis perpajakan yang kompleks, melainkan sebagai bagian dari perjalanan sebuah usaha: mulai dari munculnya ide bisnis, kegiatan produksi dan penjualan, pencatatan pendapatan dan biaya, terbentuknya laba, hingga munculnya tanggung jawab perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Pelatihan PPh Badan pada generasi muda bukan ditujukan agar siswa langsung mampu melaksanakan kewajiban perpajakan badan secara mandiri. Tujuan yang lebih mendasar adalah menanamkan fondasi pengetahuan dan sikap taat pajak sejak dini. Ketika siswa kelak menjadi mahasiswa, pekerja, maupun wirausaha, mereka telah memiliki pemahaman awal bahwa aktivitas ekonomi mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab. Dengan demikian, pendidikan perpajakan yang terintegrasi dengan kewirausahaan dapat menjadi investasi jangka panjang untuk membentuk generasi muda yang kreatif, mandiri, melek keuangan, sadar pajak, dan memiliki integritas dalam menjalankan kegiatan ekonomi.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan tema “Pelatihan PPh Badan sebagai Bekal Wirausaha untuk Generasi Muda” dilaksanakan sebagai bentuk edukasi perpajakan dan kewirausahaan bagi siswa sebagai generasi muda. Kegiatan ini dilatarbelakangi dengan masih terbatasnya pemahaman siswa mengenai konsep dasar perpajakan, khususnya hubungan antara aktivitas usaha dengan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Bagi siswa, istilah seperti wajib pajak badan, penghasilan, biaya, laba, dan kewajiban perpajakan masih bersifat abstrak apabila disampaikan hanya melalui pendekatan teoritis. Oleh karena itu, metode pelaksanaan dirancang secara sederhana, interaktif, kontekstual, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Sari et al. (2023) menunjukkan bahwa sosialisasi kesadaran pajak sejak pendidikan dasar dapat menjadi bagian dari upaya membentuk pemahaman perpajakan generasi mendatang. Karlinah et al. (2024) menunjukkan bahwa edukasi pajak melalui wawancara, modul, presentasi, pelatihan, diskusi, dan pendampingan memperoleh respons positif dari peserta didik. Kegiatan PKM ini tidak hanya diarahkan untuk menjadikan siswa sebagai wajib pajak yang mampu menghitung dan melaporkan PPh Badan secara mandiri, melainkan memberikan juga *fondasi tax awareness*, *tax mindset*, literasi keuangan, dan entrepreneurial mindset sejak dini.

3. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi tiga tahapan utama, yaitu pra-pelatihan, pelaksanaan pelatihan, dan pasca-pelatihan. Pembagian tahapan tersebut bertujuan agar kegiatan tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi dimulai dari identifikasi kondisi awal peserta, proses pembelajaran, pengukuran perubahan pengetahuan dan sikap, serta pendampingan setelah kegiatan. Dalam dokumen PKM, tahapan tersebut telah dirancang secara sistematis untuk memastikan bahwa kebutuhan mitra menjadi dasar penyusunan materi dan metode pembelajaran.

1.1 Tahap Pra-Pelatihan

Tahap pra-pelatihan merupakan tahap persiapan sekaligus identifikasi kebutuhan peserta. Tim PKM melakukan koordinasi dengan pihak sekolah, khususnya kepala sekolah dan guru ekonomi, untuk menentukan peserta, materi, serta bentuk kegiatan yang sesuai dengan karakteristik siswa. Peserta kegiatan ditetapkan berasal dari siswa menengah dengan tujuan menanamkan kesadaran pajak sejak

dini. Pelibatan guru pada tahap awal menjadi penting karena guru memiliki pemahaman mengenai karakteristik, kemampuan akademik, dan kebutuhan belajar siswa. Tujuan tahap ini adalah mempersiapkan instrumen dan mengukur kondisi awal mitra. Pada tahap ini dilakukan koordinasi dengan Mitra sekolah. Tim PKM berdiskusi dengan Kepala Sekolah dan Guru Ekonomi untuk menentukan topik kegiatan. Pihak Mitra menentukan pelatihan akan dilaksanakan untuk siswa dengan tujuan untuk menanamkan kesadaran pajak pada generasi muda sejak dini.

Pada tahap ini juga dilakukan asesmen awal melalui *pre-test* dan angket motivasi. *Pre-test* digunakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal peserta mengenai pajak, sedangkan angket digunakan untuk mengetahui sikap dan ketertarikan peserta terhadap materi perpajakan. Penggunaan asesmen awal penting karena keberhasilan pelatihan tidak dapat hanya dilihat dari terlaksananya kegiatan, tetapi harus dibandingkan dengan kondisi peserta sebelum dan sesudah pelatihan.

Pendekatan asesmen awal juga sesuai dengan hasil penelitian Fadhilatunisa et al. (2023), yang menunjukkan pentingnya analisis tingkat literasi pajak dan kebutuhan peserta sebelum melaksanakan program sosialisasi perpajakan. Dengan mengetahui kondisi awal peserta, penyelenggara dapat menyesuaikan tingkat kedalaman materi dan memilih metode pembelajaran yang lebih sesuai. Dalam konteks siswa menengah, materi PPh Badan perlu disederhanakan dan dikaitkan dengan pengalaman ekonomi yang dekat dengan kehidupan mereka.

1.2 Tahap Pelaksanaan Pelatihan

Tahap pelaksanaan merupakan inti kegiatan PKM. Pelatihan dilaksanakan selama 1,5 jam dengan metode *Project Based Learning* (PBL) dan proporsi pembelajaran sebesar 80% praktik serta 20% teori. Materi yang diberikan meliputi pengenalan pajak, perhitungan sederhana pajak untuk badan, dan mekanisme pelaporan pajak untuk badan. Kegiatan kemudian ditutup dengan permainan atau latihan soal untuk memperkuat pemahaman peserta.

Penggunaan metode *Project Based Learning* dipilih karena siswa tidak hanya menerima penjelasan secara satu arah, tetapi diarahkan untuk memahami konsep melalui kasus atau aktivitas yang menyerupai situasi nyata. Afifah et al. (2023) menunjukkan bahwa pembelajaran inklusi pajak berbasis PBL dapat digunakan untuk mengintegrasikan pendidikan pajak dan meningkatkan kesadaran peserta didik. Metode tersebut relevan dengan kegiatan ini karena konsep PPh Badan dapat dijelaskan melalui simulasi usaha sederhana. Misalnya, siswa diberikan ilustrasi sebuah usaha makanan. Siswa diajak menentukan jenis produk, memperkirakan penjualan, mengenali biaya, menghitung laba sederhana, kemudian mendiskusikan mengapa kegiatan usaha memiliki konsekuensi perpajakan. Dengan cara tersebut, siswa tidak langsung dibebani dengan ketentuan perpajakan yang kompleks. Mereka terlebih dahulu memahami hubungan usaha → pendapatan → biaya → laba → kewajiban perpajakan. Pendekatan seperti ini sesuai dengan solusi yang dirancang dalam kegiatan, yaitu menyederhanakan materi PPh Badan melalui simulasi usaha kecil.

Metode pembelajaran juga didukung dengan presentasi visual, diskusi, tanya jawab, permainan edukatif, dan studi kasus.. Kegiatan edukasi pajak yang hanya mengandalkan ceramah berpotensi membuat konsep perpajakan dipersepsikan sebagai materi yang sulit. Sebaliknya, contoh usaha yang dekat dengan kehidupan siswa dapat membantu mereka memahami bahwa pajak bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian dari tanggung jawab dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Hal ini sejalan dengan Karlinah et al. (2024), yang menunjukkan bahwa kegiatan edukasi pajak kepada peserta didik dapat dilakukan melalui pendekatan yang melibatkan presentasi, pelatihan, diskusi, dan pendampingan. Dengan demikian, metode pelaksanaan PKM ini telah mengombinasikan aspek kognitif, afektif, dan praktik sehingga proses pembelajaran menjadi lebih komprehensif.

1.3 Tahap Pasca-Pelatihan

Tahap pasca-pelatihan dilakukan melalui *post-test*, pengisian angket, dan pendampingan selama dua minggu melalui grup WhatsApp. *Post-test* digunakan untuk mengetahui perubahan tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti pelatihan, sedangkan angket digunakan untuk memperoleh informasi mengenai respons, ketertarikan, dan persepsi peserta terhadap kegiatan. Grup WhatsApp digunakan sebagai sarana pendampingan sehingga komunikasi tidak langsung berhenti setelah kegiatan tatap muka selesai.

Pendampingan pasca-pelatihan memiliki nilai penting dalam memastikan keberlanjutan hasil kegiatan. Tussifah dan Hapsari (2025) menekankan pentingnya peran guru dalam pendidikan pajak melalui pelatihan, penggunaan media atau aplikasi, serta forum diskusi antara guru dan siswa. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan pajak memerlukan ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan dan tidak hanya mengandalkan kegiatan sosialisasi satu kali. Partisipasi mitra juga menjadi komponen penting dalam tahap pasca-pelatihan. Guru berperan sebagai co-fasilitator selama kegiatan, membantu mendorong keaktifan siswa, memberikan masukan, serta ikut melakukan evaluasi. Model tersebut diharapkan menghasilkan *transfer of knowledge*, sehingga materi yang telah diberikan dapat diteruskan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran berikutnya.



Gambar 1 : Kegiatan Pelaksanaan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran tingkat ketercapaian kegiatan "Pelatihan PPh Badan sebagai Bekal Wirausaha untuk Generasi Muda" dilakukan secara sistematis, objektif, dan berkelanjutan. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui apakah solusi yang diberikan mampu menjawab permasalahan spesifik mitra dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan pada 3 aspek: Kognitif, Psikomotorik, dan Afektif-Ekonomi.

Aspek Kognitif

Aspek kognitif digunakan untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta mengenai pajak, PPh Badan, fungsi pajak, penghasilan, biaya, laba, dan mekanisme perpajakan secara sederhana. Pengukuran dilakukan melalui perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test*.

Indikator keberhasilannya meliputi:

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian pajak;
2. Siswa dapat menjelaskan fungsi pajak secara sederhana;
3. Siswa dapat memahami pengertian PPh Badan;

4. Siswa dapat menghubungkan kegiatan usaha dengan kewajiban perpajakan;
5. Siswa mampu menyelesaikan kasus sederhana mengenai usaha dan pajak.

Peningkatan skor *post-test* dibandingkan *pre-test* menjadi indikator kuantitatif untuk mengetahui efektivitas penyampaian materi. Namun, karena dokumen yang menjadi dasar kegiatan tidak mencantumkan angka hasil *pre-test* dan *post-test* aktual, nilai peningkatan tidak seharusnya dibuat atau diasumsikan. Data tersebut perlu diisi berdasarkan hasil evaluasi lapangan yang sebenarnya.

Literasi pajak merupakan aspek penting dalam pembentukan kesadaran perpajakan. Tantriangela dan Setyowati (2023), sebagaimana dirujuk dalam dokumen kegiatan, menjelaskan bahwa literasi pajak tidak hanya berkaitan dengan mengetahui tarif pajak, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai tujuan pajak, hak dan kewajiban, serta mekanisme perpajakan.

Aspek Psikomotorik

Aspek psikomotorik mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan yang diperoleh melalui aktivitas praktik. Dalam kegiatan ini, kemampuan tersebut diwujudkan melalui penyelesaian studi kasus sederhana mengenai kegiatan usaha dan perpajakan.

Indikatornya meliputi kemampuan siswa untuk:

- Mengidentifikasi kegiatan ekonomi suatu usaha;
- Membedakan pendapatan dan biaya;
- Menentukan laba sederhana;
- Menghubungkan laba usaha dengan kewajiban perpajakan;
- Menyelesaikan simulasi kasus PPh Badan sederhana;
- Menjelaskan kembali proses yang telah dilakukan.

Supardi et al. (2022) menekankan pentingnya pendidikan kewirausahaan dalam membangun kompetensi peserta didik agar mampu menjadi wirausaha yang kompeten. Oleh karena itu, pembelajaran PPh Badan perlu dikaitkan dengan proses pengelolaan usaha secara sederhana.

Aspek Afektif-Ekonomi

Aspek afektif-ekonomi digunakan untuk mengukur perubahan sikap siswa terhadap pajak dan kewirausahaan. Indikator yang dapat digunakan antara lain:

1. Ketertarikan siswa terhadap materi perpajakan;
2. Kesadaran mengenai pentingnya pajak;
3. Persepsi positif terhadap kewajiban perpajakan;
4. Minat mengenal dunia usaha;
5. Kesadaran pentingnya pencatatan dan pengelolaan keuangan usaha;
6. Kesiediaan mempelajari perpajakan lebih lanjut.

Aspek tersebut penting karena tujuan PKM bukan hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap positif terhadap pajak. Abbas et al. (2021), sebagaimana dicantumkan dalam dokumen, menunjukkan bahwa program edukasi perpajakan dapat meningkatkan kesadaran pajak peserta. Hal tersebut memperkuat argumentasi bahwa pendidikan pajak dapat dimulai sebelum seseorang menjadi wajib pajak aktif.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan “Pelatihan PPh Badan sebagai Bekal Wirausaha untuk Generasi Muda” dapat dinilai berjalan lancar dan baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, partisipasi mitra, metode pembelajaran, serta mekanisme evaluasi. Kegiatan telah menjawab permasalahan – permasalahan yang menjadi kendala.

Permasalahan pertama adalah terbatasnya literasi perpajakan sejak usia sekolah. Pajak pada umumnya dipersepsikan sebagai urusan orang dewasa yang telah bekerja atau memiliki usaha. Persepsi tersebut menyebabkan siswa belum melihat keterkaitan antara aktivitas ekonomi yang mereka kenal sehari-hari dengan sistem perpajakan. Solusi untuk mengatasinya adalah : Pengenalan

pajak sejak dini dapat membantu membentuk sikap positif terhadap pajak. Arsandi dan Ahmad (2022) menunjukkan bahwa program inklusi kesadaran pajak dan strategi komunikasi merupakan bagian penting dalam membangun pemahaman pajak generasi muda.

Permasalahan kedua adalah belum kuatnya keterkaitan antara pendidikan kewirausahaan dan pendidikan perpajakan. Pendidikan kewirausahaan sering kali lebih menekankan ide bisnis, kreativitas produk, pemasaran, dan motivasi menjadi pengusaha. Sementara itu, aspek administrasi, pencatatan keuangan, serta perpajakan belum selalu menjadi bagian yang diperkenalkan secara proporsional pada tahap awal. Solusi untuk mengatasinya adalah : memberikan pemahaman pengelolaan keuangan. Seorang wirausaha yang bertanggung jawab perlu memahami bahwa keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh besarnya penjualan, tetapi juga oleh kemampuan mengelola keuangan dan memenuhi kewajiban usaha.

Permasalahan ketiga adalah kompleksitas materi perpajakan. Peraturan perpajakan memiliki istilah dan ketentuan yang dapat sulit dipahami oleh peserta didik. Oleh sebab itu, diperlukan proses penyederhanaan materi tanpa menghilangkan substansi utamanya. Solusi untuk mengatasinya adalah : Penjelasan materi PPh Badan disampaikan dengan menggunakan analogi sederhana, misalnya melalui simulasi usaha kecil: siswa menentukan produk, menghitung penjualan, mengenali biaya, memahami laba, kemudian melihat bahwa dalam sistem ekonomi terdapat kewajiban perpajakan yang perlu diperhatikan ketika usaha berkembang dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Permasalahan keempat adalah kebutuhan terhadap metode pembelajaran yang menarik dan partisipatif. Solusi untuk mengatasinya adalah : Kegiatan diupayakan dengan metode yang tidak membosankan, Teori yang disampaikan dikaitkan dengan pengalaman berupa contoh nyata kegiatan pendidikan pajak dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini memberikan respons positif dari siswa. Materi disampaikan melalui presentasi, diskusi, pelatihan, dan pendampingan. Karlinah et al. (2024) menunjukkan tingginya partisipasi siswa dalam kegiatan edukasi pajak, sedangkan Afifah et al. (2023) menunjukkan bahwa pendekatan *Project Based Learning* dapat digunakan untuk mengintegrasikan pendidikan pajak dan meningkatkan kesadaran peserta didik.

Permasalahan kelima adalah keterbatasan pengalaman siswa dalam menghubungkan konsep pajak dengan dunia nyata. Solusi untuk mengatasinya adalah : PPh Badan akan lebih mudah dipahami apabila siswa diberikan ilustrasi mengenai perusahaan atau usaha yang dekat dengan kehidupan mereka. Sebagai contoh, siswa dapat diberikan studi kasus mengenai usaha makanan yang berkembang dari penjualan sederhana menjadi sebuah badan usaha. Dari kasus tersebut, siswa dapat memahami bahwa pertumbuhan bisnis membawa konsekuensi pada kebutuhan pengelolaan administrasi, keuangan, dan perpajakan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diarahkan untuk memberikan solusi melalui pembelajaran PPh Badan yang sederhana, kontekstual, dan menyenangkan. Materi tidak berorientasi pada penguasaan perhitungan pajak secara teknis, melainkan pada pembentukan *tax mindset* dan *entrepreneurial mindset* sejak dini.

Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh tahapan program berjalan sesuai dengan perencanaan dan apakah solusi yang diberikan relevan dengan permasalahan mitra. Evaluasi tidak hanya menilai keberhasilan penyampaian materi, tetapi juga mencakup partisipasi peserta, efektivitas metode, keterlibatan guru, pemahaman peserta, kepuasan peserta, dan keberlanjutan program. Berdasarkan rancangan dan dokumentasi kegiatan, pelaksanaan dapat dinilai berjalan lancar dan baik secara proses, karena setiap tahapan telah memiliki kegiatan dan indikator yang jelas. Tahap pra-pelatihan melibatkan pihak sekolah dalam menentukan peserta dan materi. Tahap pelaksanaan menggunakan metode interaktif dengan kombinasi teori dan praktik.

Tahap pasca-pelatihan menyediakan evaluasi dan pendampingan. Struktur tersebut menunjukkan bahwa kegiatan telah dirancang secara sistematis dan tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan seminar satu kali.

Evaluasi Partisipasi Peserta

Partisipasi siswa menjadi salah satu indikator penting keberhasilan kegiatan. Peserta diharapkan mengikuti kegiatan secara aktif, mengajukan pertanyaan, mengikuti diskusi, mengerjakan studi kasus, serta mengikuti permainan edukatif. Metode pembelajaran yang interaktif memberikan ruang kepada siswa untuk terlibat secara langsung. Hal ini penting karena generasi muda memiliki karakteristik belajar yang membutuhkan variasi aktivitas dan contoh konkret. Kegiatan edukasi pajak yang dilakukan Karlinah et al. (2024) juga menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan interaktif dapat memperoleh respons positif dari peserta didik.

Evaluasi Keterlibatan Guru

Keterlibatan guru merupakan salah satu kekuatan pelaksanaan kegiatan. Guru tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Guru berfungsi sebagai *co-fasilitator* yang mendampingi siswa selama kegiatan dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan program. Keterlibatan tersebut memberikan manfaat jangka panjang karena guru dapat meneruskan materi atau mengembangkan aktivitas pembelajaran serupa. Tussifah dan Hapsari (2025) menekankan bahwa penguatan peran guru merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pendidikan pajak. Oleh karena itu, keterlibatan guru dalam kegiatan ini tidak hanya membantu kelancaran kegiatan, tetapi juga mendukung keberlanjutan program.

Evaluasi Metode Pembelajaran

Metode *Project Based Learning* (PBL), studi kasus, diskusi, permainan, dan simulasi dinilai sesuai dengan karakteristik kegiatan karena materi PPh Badan relatif kompleks bagi siswa. Penyederhanaan materi menjadi konteks usaha sederhana memungkinkan siswa memahami konsep pajak tanpa harus mempelajari ketentuan perpajakan secara teknis dan mendalam. Penggunaan PBL juga memiliki dasar penelitian. Afifah et al. (2023) menunjukkan bahwa pembelajaran inklusi pajak berbasis PBL dapat digunakan sebagai pendekatan untuk meningkatkan kesadaran peserta didik. Selain itu, Chen et al. (2021) melalui kajian sistematis mengenai pendidikan kewirausahaan berbasis teknologi menekankan pentingnya pendekatan pembelajaran terapan dan penggunaan teknologi untuk mendukung pengalaman belajar kewirausahaan.

Evaluasi Kesesuaian Materi

Materi yang diberikan telah disesuaikan dengan tingkat peserta. Kegiatan tidak diarahkan pada perhitungan PPh Badan yang kompleks, tetapi pada pengenalan hubungan antara usaha dan pajak. Materi dimulai dari konsep pajak, aktivitas usaha, pendapatan, biaya, laba, kemudian dikaitkan dengan tanggung jawab perpajakan. Pendekatan tersebut sesuai dengan kebutuhan generasi muda sebagaimana dijelaskan dalam dokumen, bahwa PPh Badan perlu dijadikan sebagai bagian dari perjalanan suatu usaha, bukan sebagai materi teknis yang kompleks. Kesesuaian materi juga didukung oleh Español et al. (2024), yang menemukan hubungan antara literasi keuangan dan perilaku kewirausahaan pada generasi mudamenengah pertama. Artinya, pengenalan konsep keuangan dan usaha pada usia sekolah memiliki relevansi terhadap pembentukan perilaku kewirausahaan.

Evaluasi Keberlanjutan

Keberlanjutan kegiatan diwujudkan melalui pendampingan selama dua minggu menggunakan grup *WhatsApp* dan keterlibatan guru sebagai *co-fasilitator*. Model ini memungkinkan siswa mengajukan pertanyaan setelah pelatihan dan memungkinkan guru memperoleh pengetahuan yang dapat digunakan kembali dalam proses pembelajaran. Keberlanjutan menjadi penting karena

literasi perpajakan tidak dapat terbentuk hanya melalui satu kali pertemuan. Tussifah dan Hapsari (2025) menunjukkan pentingnya penguatan peran guru dan lingkungan pembelajaran dalam pendidikan pajak. Dengan demikian, kegiatan PKM ini dapat menjadi titik awal untuk mengembangkan kegiatan lanjutan mengenai literasi keuangan, kewirausahaan, pencatatan usaha, maupun perpajakan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan “Pelatihan PPh Badan sebagai Bekal Wirausaha untuk Generasi Muda” dapat dinilai berjalan lancar dan baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, partisipasi mitra, metode pembelajaran, serta mekanisme evaluasi. Kegiatan telah menjawab permasalahan utama mitra melalui pendekatan yang sederhana dan kontekstual. Permasalahan pertama berupa keterbatasan literasi perpajakan dijawab melalui pengenalan konsep pajak dan PPh Badan. Permasalahan kedua berupa belum kuatnya hubungan antara kewirausahaan dan perpajakan dijawab melalui studi kasus kegiatan usaha. Permasalahan ketiga berupa kompleksitas materi perpajakan dijawab dengan penyederhanaan materi menggunakan analogi dan simulasi. Sementara itu, kebutuhan terhadap pembelajaran yang menarik dijawab melalui PBL, diskusi, permainan, dan studi kasus.

Keberhasilan kegiatan juga dapat dilihat dari keterpaduan antara literasi pajak, literasi keuangan, dan pendidikan kewirausahaan. Ketiga aspek tersebut tidak diberikan secara terpisah, tetapi dihubungkan melalui konteks kegiatan usaha. Seorang calon wirausaha tidak hanya perlu mengetahui cara menghasilkan pendapatan, tetapi juga perlu memahami biaya, laba, pencatatan keuangan, dan tanggung jawab perpajakan. Wicaksono et al. (2024) menunjukkan adanya hubungan literasi keuangan dengan intensi kewirausahaan. Najjuah et al. (2024) juga menunjukkan keterkaitan literasi keuangan dan pendidikan kewirausahaan dengan intensi kewirausahaan digital. Dengan demikian, integrasi ketiga aspek dalam kegiatan PKM ini memiliki dasar konseptual yang relevan.

Kegiatan ini juga memiliki nilai strategis dalam membentuk pola pikir generasi muda. Tujuan pendidikan perpajakan sejak dini bukan agar siswa langsung menjadi ahli pajak, tetapi agar mereka memahami bahwa aktivitas ekonomi mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab. Ketika kelak menjadi pekerja, pelaku usaha, atau pemilik badan usaha, siswa telah memiliki pengetahuan awal mengenai pentingnya kepatuhan dan pengelolaan usaha yang bertanggung jawab.

5. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema “Pelatihan PPh Badan sebagai Bekal Wirausaha untuk Generasi Muda” merupakan kegiatan edukasi yang dirancang untuk meningkatkan literasi perpajakan, literasi keuangan, dan pemahaman kewirausahaan generasi muda. Pelaksanaan kegiatan menggunakan tiga tahap, yaitu pra-pelatihan, pelaksanaan, dan pasca-pelatihan. Metode tersebut memungkinkan kegiatan dimulai dari identifikasi kebutuhan peserta, dilanjutkan dengan pembelajaran interaktif melalui *Project Based Learning*, studi kasus, diskusi, permainan, dan simulasi, kemudian diakhiri dengan evaluasi dan pendampingan. Kegiatan berjalan lancar dan baik karena seluruh komponen utama telah dirancang secara sistematis dan melibatkan mitra sekolah. Guru berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, sedangkan siswa terlibat dalam kegiatan pembelajaran dan latihan. Materi juga telah disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa dengan menekankan pengenalan konsep PPh Badan secara sederhana, bukan perhitungan perpajakan yang kompleks.

Pengukuran keberhasilan dilakukan melalui aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif-ekonomi dengan menggunakan *pre-test*, *post-test*, angket, observasi partisipasi, dan evaluasi kegiatan. Model pengukuran tersebut memungkinkan keberhasilan program dinilai secara lebih menyeluruh. Pendampingan selama dua minggu melalui grup *WhatsApp* dan keterlibatan guru juga memberikan peluang bagi keberlanjutan program setelah pelatihan selesai.

Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai pajak, tetapi juga menanamkan *tax mindset* dan entrepreneurial mindset sejak dini. Integrasi antara pendidikan perpajakan, literasi keuangan, dan kewirausahaan diharapkan dapat menjadi fondasi bagi terbentuknya generasi muda yang memiliki kesadaran pajak, bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitas ekonomi, serta siap menghadapi dunia usaha di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, J., Arniati, A., Mayasari, M., Anggreini, V. S., & Yulianingsih, S. A. (2023). Pembelajaran inklusi pajak berbasis PBL: Proyek pengembangan e-filing pajak penghasilan versi edukasi. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 8(2), 47–55. <https://doi.org/10.30871/jaat.v8i2.6589> Jurnal Politeknik Negeri Batam
- Arsandi, S. A., & Ahmad, N. (2022). Kebijakan inklusi kesadaran pajak dan strategi komunikasi DJP: Studi kasus program Pajak Bertutur. *JATI: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 5(1). <https://doi.org/10.18196/jati.v5i1.13814> Jurnal Unmer
- Chen, L., Ifenthaler, D., & Yau, J. Y. K. (2021). Online and blended entrepreneurship education: A systematic review of applied educational technologies. *Entrepreneurship Education*, 4, 191–232. <https://doi.org/10.1007/s41959-021-00047-7>
- Darussalam, Septriadi, D., Damian, D. H., Irawan, R., Kristiaji, B. B., & Marhani, A. R. (2023). *DDTC Indonesian tax manual book 2023*. DDTC. DDTC
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Inklusi kesadaran pajak dalam pendidikan*. Direktorat Jenderal Pajak. Jurnal PKN STAN
- Español, R. D., Miñoza, J. T., & Zosa, L. (2024). Financial literacy and entrepreneurial behavior of junior high school students: Basis for TLE management plan. *Ho Chi Minh City Open University Journal of Science – Economics and Business Administration*, 14(4), 3–19. <https://doi.org/10.46223/HCMCOUJS.econ.en.14.4.2808.2024> Journal of Science
- Fadhilatunisa, D., Fakhri, M. M., Isma, A., Affandi, A., & Hartono, H. (2023). Peningkatan literasi pajak mahasiswa kewirausahaan melalui program sosialisasi pajak. *Jurnal Sipakatau: Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 33–41. <https://doi.org/10.61220/jsipakatau.v1i1.231> Globresco Journal
- Hamid, N., Ismail, I., Yunus, N., Jali, M., & Rosly, A. (2022). Taxpayer perceptions of tax awareness, tax education, and tax complexity among small and medium enterprises in Malaysia: A quadrant analysis approach. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 10(1), 231–242. <https://doi.org/10.13189/ujaf.2022.100124> Globresco Journal
- Karlinah, L., Diphayana, W., & Wiguna, N. K. C. (2024). Upgrade your knowledge in tax: Tax awareness from an early age in education. *Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang*, 9(2), 433–444. <https://doi.org/10.26905/abdimas.v9i2.12664> Jurnal Unmer
- Koraag, S. T. G., Zaki, A., Rahmawati, S. A., & Oktafiani, B. (2025). Exploring the influence of entrepreneurial education and environment on entrepreneurial readiness: The mediating effects of entrepreneurial mindset and financial literacy in shaping student intentions.

- Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 14(1).
<https://doi.org/10.26418/jebik.v14i1.87012> Jurnal Untan
- Najjuah, N., Wibowo, A., & Pratama, A. (2024). The linkage between financial literacy and digital entrepreneurial intention: The mediation and moderation role of entrepreneurship education and social media. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 17(1).
<https://doi.org/10.17977/UM014v17i1p001> Journal FE
- Nistiana, L., Wardani, D., & Primastiwi, A. (2022). Pengaruh literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak: Studi kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 2(1), 99–114.
<https://doi.org/10.56672/syirkah.v2i1.47> Globresco Journal
- Rika, A. R., Hasanudin, A. I., Lestari, T., Retnowati, W., & Rika, A. R. (2026). The role of tax literacy on MSME tax compliance: The mediating effect of public trust and the moderating role of Kalosara. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 30(1).
<https://doi.org/10.20885/jaai.vol30.iss1.art14> Journal UII
- Sari, N. P., Centiviola, R., Alysa, R., Priyanika, S., & Susilo, D. E. (2023). Sosialisasi kesadaran pajak sejak dini pada pendidikan dasar di Kecamatan Jogoroto Jombang. *Pengabdian pada Masyarakat (J-PMas)*, 2(1), 22–27. <https://doi.org/10.37606/j-pmas.v2i1.59> Jurnal Unmer
- Supardi, E., Islamy, F. J., Muhidin, S. A., & Sutarni, N. (2022). How to educate student become competent entrepreneurs. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 41(1).
<https://doi.org/10.21831/cp.v41i1.45912> UNY Journal
- Tussifah, L., & Hapsari, A. D. (2025). Optimalisasi peran guru SMA/ sederajat dalam kurikulum pendidikan pajak di era Society 5.0. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 9(1), 37–48. Jurnal PKN STAN
- Wicaksono, P. N. H., Mardi, M., & Respati, D. K. (2024). The influence of entrepreneurial motives, family environment and financial literacy on entrepreneurial intentions. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 12(1), 43–56. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v12i1.2388> Jurnal IBIK